

Analisis Prinsip State Consent dalam Pembuatan Advisory Opinion terkait Sengketa Berjalan oleh Mahkamah Internasional: Studi Legal Consequences Of The Separation Of The Chagos Archipelago From Mauritius In 1965 = Analysis of State Consent Principle in Advisory Opinion related to a Pending Dispute by International Court of Justice: Study of Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965

Salsabila Siliwangi Surtiwa, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20508763&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Fungsi *advisory* adalah salah satu fungsi yang dimiliki oleh Mahkamah Internasional sebagai organ utama PBB. Terdapat perkembangan untuk membahas pertanyaan hukum yang terkait sengketa berjalan melalui fungsi *advisory* meski memiliki karakteristik *contentious*. Perbedaan antara dua fungsi ini adalah signifikansi dari prinsip *state consent* sebagai landasan. Terdapat dua pandangan bertentangan terkait kedudukan prinsip *state consent* dalam *advisory opinion* terkait sengketa berjalan. Pandangan pro *state consent* menekankan pada kaitannya dengan prinsip *international obligation*, *compliance*, dan prinsip yudisial dengan karakteristik serupa yakni *res judicata* dan *lis pendens*. Di sisi lain, pandangan yang mengesampingkan *state consent* menegaskan pada urgensi pada isu tertentu yang berkaitan dengan tujuan PBB sebagai organisasi, salah satunya mengenai isu dekolonisasi dan pendapat Mahkamah Internasional sebelumnya bahwa *state consent* tidak dibutuhkan dalam yurisdiksi *advisory*. Setelah melakukan penelitian dengan metode studi pustaka, dapat disimpulkan bahwa pembahasan suatu sengketa berjalan dalam *advisory opinion* harus dilihat secara kasus per kasus, dari perumusan pertanyaan hukum yang diajukan, ada tidaknya isu terkait perdamaian dan keamanan dunia, serta keanggotaan dari negara pihak dalam PBB, untuk dapat menentukan dicerainya prinsip *state consent*. Dalam *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965*, terdapat isu dekolonisasi yang belum terselesaikan karena terdapat pemisahan paksa antara Kepulauan Chagos dengan Mauritius. Selain itu, Mauritius dan Inggris Raya merupakan anggota PBB, yang mana artinya telah memberikan *state consent* fondasional terhadap yurisdiksi Mahkamah Internasional. Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya ketentuan lebih mendetail bagi pelaksanaan fungsi *advisory opinion*, terutama dalam hal pertanyaan tersebut berkaitan erat dengan sengketa berjalan.

The advisory function is one of the functions upheld by the International Court of Justice (ICJ) as one of the principle organs of the United Nations (UN). There is a trend to discuss legal questions related to pending disputes through the advisory function despite having contentious characteristics, where the two functions share different significance of the principle of state consent. The pro state consent view emphasizes its relation to the principles of international obligation, compliance, and judicial principles such as *res judicata* and *lis pendens*. The opposing view refers to the mandate of UN to maintain international peace and a previous ICJ opinion which points out that state consent is not required in the advisory jurisdiction. It can be concluded that

advisory opinion on pending disputes must be seen on a case-by-case basis; from the formulation of the questions, its relation to international peace, as well as the state membership to the UN, to determine the role of state consent. In the *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965*, there is an unresolved issue of decolonialism due to the forced separation between the Chagos Islands and Mauritius. In addition, Mauritius and the United Kingdom are members of the UN, which means they have given their foundational state consent to the jurisdiction of the ICJ. The recommendation that can be given is the need for more detailed provisions for the implementation of the advisory opinion function, especially related to a pending dispute.